



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. SYARIFUDDIN
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 800830

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	920.000.000
1. Tanah Seluas 275 m2 di KAB / KOTA TAPIN, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
2. Tanah Seluas 1.516 m2 di KAB / KOTA TAPIN, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/190 m2 di KAB / KOTA TAPIN, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 366 m2/366 m2 di KAB / KOTA TAPIN, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	440.600.000
1. MOTOR, HONDA VCX/ SPM R 2/SCOOTER Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 24.600.000		
2. MOTOR, HONDA F1C02NAGLO A/T / SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
3. MOBIL, HONDA HR-V 1.5 L SE CVT B Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.844.065.330



F. HARTA LAINNYA	Rp.	240.000.000
Sub Total	Rp.	3.444.665.330
III. HUTANG	Rp.	103.201.461
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.341.463.869

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.